



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ABADI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
3. NHK : 932825

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.690.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 231.000.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH MPNP/MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- MOTOR, VARIO VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.869.914

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.006.869.914

III. HUTANG Rp. 475.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.531.869.914



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.